

Dampak Penutupan Lokalisasi Kedungbanteng Terhadap Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat

Erwin Andrianto¹, Nafiah², Suad Fikriawan³

¹ Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

² Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia

Abstract

This article examines the impact of the closure of a localization area on the socioeconomic conditions of the community in Dukuh Kalipucang, Desa Kedungbanteng, Ponorogo Regency. This qualitative research aims to understand the social and economic changes that occurred in the community following the closure of the localization area, which previously served as a central economic hub for many local residents. Through in-depth interviews and direct observations, the study identifies various impacts of the localization closure, including changes in livelihood structures, shifts in social patterns, and effects on economic and social well-being. The findings indicate that the closure had a significant impact on the local economy, resulting in the loss of a primary source of income for many residents who depended on activities in the area. Additionally, the closure triggered shifts in social structures, such as changes in small business forms and increased reliance on social assistance. Although there have been efforts to address the negative impacts through economic diversification and skills training, challenges remain in terms of social adaptation and economic recovery. The study concludes that the closure of the localization area affects not only economic aspects but also the social dynamics of the community. The research employs a descriptive qualitative method, with data obtained through interviews. The findings show that the impacts of the localization closure are deeply felt by those who relied on the area for their livelihoods.

Keywords

socioeconomic impact; illegal prostitution; localization

Corresponding Author

Erwin Andrianto

Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, Indonesia; andriantoerwin972@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang perlu diatasi, dengan menekankan upaya pencegahan dan perbaikan. Istilah "pelacuran" berasal dari bahasa Latin *pro-stitute* atau *prostauree*, yang berarti membiarkan diri melakukan perbuatan zina atau persundalan. Dalam bahasa Inggris, "prostitute" merujuk pada pelacur atau sundal, yang juga dikenal dengan istilah WTS (Wanita Tuna Susila). Wanita Tuna Susila sering dipandang sebagai bagian dari masalah sosial dan dianggap kurang beradab karena mereka menyerahkan diri kepada banyak pria untuk pemuasan seksual, dengan imbalan uang dari para pelanggan.



Keberadaan Wanita Tuna Susila seringkali menghadapi penolakan dari berbagai kalangan yang melihat "profesi" ini sebagai pekerjaan yang rendah, pengganggu hubungan rumah tangga, dan sebagai bentuk penjualan harga diri melalui bisnis esek-esek. Banyak orang juga menganggap Wanita Tuna Susila sebagai individu yang tidak mendapatkan pendidikan agama dan moral yang memadai, bahkan ada yang menyebut mereka sebagai wanita "haram." (Natsir, 2019a, hlm. 2)

Dampak prostitusi dapat memiliki aspek positif maupun negatif, tergantung dari perspektifnya. Salah satu dampak positifnya adalah keberadaan lokalisasi prostitusi yang dapat memicu munculnya berbagai usaha lain, seperti warung yang menjual makanan, rokok, minuman keras, serta penginapan atau hotel yang menyediakan fasilitas untuk pelaku prostitusi. Contohnya dapat dilihat di daerah Kecamatan Sukorejo, di mana banyak warga sekitar memanfaatkan kegiatan prostitusi untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Masyarakat yang tinggal di sekitar area lokalisasi juga turut mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan membuka warung, tempat hiburan, dan jasa parkir. (Pratama, t.t., hlm. 2)

Tapi, dibalik itu juga prostitusi merupakan perbuatan yang sebenarnya melanggar norma – norma di kalangan masyarakat, tentunya melanggar norma agama. Munculnya prostitusi di kalangan masyarakat menimbulkan banyak permasalahan dan pertentangan. Sudah diupayakan oleh pemerintah maupun organisasi masyarakat berdasarkan agama dan sosial dalam pembubaran lokalisasi tersebut. Akan tetapi, prostitusi di Indonesia awal mulanya telah dilegalkan oleh pemerintah colonial Belanda pada tahun 1852 dengan di bawah pengawasan dan kerangka hukum. Dalam peraturan tersebut (pasal 2), wanita publik (Wanita Tuna Susila) diawasi secara langsung dan secara ketat oleh polisi.

Saat ini, prostitusi di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Pengawasan terhadap lokalisasi prostitusi menjadi bagian integral dari pengawasan seluruh elemen masyarakat. Pihak Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) turut melakukan pengawasan untuk mencegah penyebaran penyakit HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang dapat menular melalui aktivitas seksual. Untuk itu, semua lapisan masyarakat, atau stakeholder, perlu bersinergi mendukung kebijakan pemerintah agar setiap proses pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang risiko kesehatan terkait prostitusi serta memperbaiki kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. (Dedi Isnandar, 2015a, hlm. 93)

Eko (2023) melakukan beberapa penelitian sebelumnya tentang dampak sosial ekonomi penutupan lokalisasi bagi masyarakat Puger Kabupaten Jember. Hasilnya menunjukkan bahwa penutupan lokalisasi memiliki efek yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Puger, dengan penurunan tingkat pekerjaan dan penurunan kualitas hidup. Dari segi sosial, penyakit menular

meningkat, yang menyebabkan kenakalan remaja. Ada sejumlah masyarakat yang setuju dengan penutupan lokasi. melalui hasil pengamatan dari studi pustaka menunjukkan bahwa dampak sosial ekonomi dari penutupan lokasi hanya ditangani oleh penelitian di atas. Penelitian ini baru karena dampak penutupan lokalisasi ditinjau dari perspektif sosial dan ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak bagaimana penutupan lokalisasi Kedungbanteng mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi orang-orang di daerah tersebut. Secara khusus, penelitian ini menilai dampak ekonomi dengan melihat perubahan dalam pendapatan, pekerjaan, dan stabilitas ekonomi masyarakat setelah penutupan lokasi. Mengusulkan Saran: Berikan saran tentang kebijakan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari penutupan lokasi terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak dari kebijakan penutupan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan implementasi kebijakan di masa mendatang.

2. METODE

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak melibatkan perhitungan angka dalam pengumpulan data. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang dampak sosial ekonomi yang timbul akibat penutupan lokalisasi. Data yang dikumpulkan berupa tanggapan, pendapat, konsep, dan uraian terkait masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan prosedur pengumpulan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Pendekatan ini fokus pada konteks dan individu secara menyeluruh. Dengan metode kualitatif, peneliti mengumpulkan semua data yang relevan dan kemudian mengelompokkannya menjadi kategori yang lebih spesifik. (Eko, 2023a, hlm. 535)

Data diperoleh melalui wawancara, dokumen, dan catatan lapangan yang berhubungan dengan lokalisasi. Kehadiran peneliti merupakan indikator keberhasilan penelitian, dengan tujuan untuk menggali data secara mendalam hingga mencapai kejenuhan data. Berdasarkan metode ilmiah, data dikumpulkan dan dianalisis untuk tujuan ilmiah dan kegunaannya. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, hadir di lapangan untuk mendapatkan data akurat tentang lokalisasi. Peneliti mengamati berbagai fenomena secara langsung dan menganalisis informasi berdasarkan pengamatan di lapangan, berusaha memahami dan menafsirkan daerah sekitar. Fokusnya adalah pada perubahan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Kedungbanteng setelah penutupan lokalisasi, serta bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi setelah sebelumnya sangat bergantung pada lokalisasi desa kedungbanteng. (Eko, 2023a, hlm. 535).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Terhadap Keberadaan Lokalisasi

Berada di tengah masyarakat sering kali menimbulkan keresahan dan gangguan terhadap kehidupan sosial. Lokalisasi, yang sering kali dianggap sebagai penyebab masalah sosial dan penyakit sosial serta penurunan moral, tidak lepas dari realitas sosial dan situasi ekonomi yang mendorong pembentukannya. Keberadaan lokalisasi sering memicu perdebatan; ada pihak yang berpendapat bahwa hal tersebut hanya akan berdampak negatif dan merugikan masyarakat secara keseluruhan, namun ada juga yang percaya bahwa lokalisasi dapat memberikan keuntungan ekonomi tertentu. Penilaian ini mencerminkan kompleksitas dampak lokalisasi, yang dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan konteks sosial-ekonomi masing-masing pihak.

Sesuai dengan frasa DR nama samaran, yang berusia 47 tahun dan merupakan salah satu figur penting dalam masyarakat Kalipucang. Keberadaan lokasi telah menimbulkan perdebatan sejak lama. Sebagian masyarakat merasa diuntungkan karena lokalisasi dapat meningkatkan pendapatan dengan membuka lapangan usaha. Salon, laundry, toko pulsa, toko obat dan kecantikan, serta jasa pijat termasuk dalam bisnis ini. Namun, beberapa orang merasa khawatir dan dirugikan dengan adanya lokasi, terutama orang tua yang khawatir tentang anak-anaknya. Takut jika anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas dan meniru kebiasaan PSK, yang berdampak pada perkembangan mental mereka. Profesi PSK dianggap sebagai sampah masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan rumah tangga.

Para pekerja seks komersial atau PSK ada beberapa sebab melacurkan diri adalah faktor ekonomi dimana faktor ini yang sering disebut sebagai faktor pendorong seorang melacurkan diri. Faktor ini dapat diartikan dengan kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi.

Lokalisasi merupakan tempat khusus yang difungsikan untuk praktik pelacuran, di mana tempat tersebut menjadi arena bagi Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari untuk mencari uang dan kepuasan. Dengan perkembangan zaman dan meningkatnya urbanisasi, lokalisasi sebagai tempat khusus kini menghadapi tantangan besar dan tidak lagi berfungsi seperti dulu. Saat ini, wilayah lokalisasi tidak hanya dihuni oleh para PSK, tetapi juga oleh masyarakat umum yang mencari nafkah tanpa terlibat langsung dalam kegiatan pelacuran. Masyarakat sekitar lokalisasi sering kali terlibat dalam berbagai usaha pendukung, seperti membuka jasa parkir, menjadi tukang ojek, mendirikan warung makan dan minuman, serta menjual alat pengaman untuk hubungan seks. Selain itu, kehadiran masyarakat umum ini juga menambah kompleksitas lingkungan lokalisasi, memperluas dampaknya baik secara sosial maupun ekonomi. Hal ini menciptakan dinamika baru di dalam masyarakat yang berdekatan dengan kawasan lokalisasi,

mengubah cara mereka berinteraksi dengan tempat tersebut dan memengaruhi struktur sosial serta ekonomi lokal. (Sutarmin & Budiarti, 2018)

Stigma Negatif keberadaan lokalisasi kedungbanteng

Selain tempat lokalisasi merupakan sebagai penambah perekonomian masyarakat juga memberi dampak buruk bagi daerah, maupun masyarakat sekitar. Selain memberi dampak buruk juga berbahaya bagi perkembangan sosial masyarakat disekitar kawasan tersebut. (Miftahul, 2016) Menurut Lokollo, Mengemukakan bahwa secara langsung maupun tidak langsung lokalisasi juga dapat memberikan pengaruh demoralisasi atau dampak sosial kepada lingkungan. khususnya masyarakat yang usianya masih muda disekitar lokalisasi tersebut Namun, pertumbuhan dan perkembangan sosial sangat diperlukan oleh masyarakat agar tidak terjerumus atau bahkan mengikuti dengan hal-hal negatif disekitarnya. Pertumbuhan dan perkembangan sosial merupakan kegiatan yang mendukung fungsi integrasi, pertumbuhan, belajar dan mencapai tujuannya. (Ayu, 2023)

Dalam setiap lapisan masyarakat, pandangan terhadap pekerja seks komersial seringkali negatif, dan stigma ini tidak hanya menysasar individu tersebut tetapi juga keluarga mereka. Anak-anak dari pekerja seks komersial, khususnya yang tinggal atau sering berada di lokasi-lokalisasi bersama ibu mereka, seringkali menjadi sasaran penilaian negatif. Masyarakat beranggapan bahwa anak-anak ini terpapar pada lingkungan yang tidak sehat dan kebiasaan buruk, yang berpotensi memengaruhi moral mereka dan membuat mereka akrab dengan perilaku menyimpang. Stigma ini kemudian berkontribusi pada proses pelabelan negatif yang sering dialami oleh anak-anak dari pekerja seks komersial, memperkuat diskriminasi yang mereka terima dalam masyarakat. (Persada, t.t., hlm. 3)

Wanita yang bekerja sebagai PSK di kedungbanteng kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Ponorogo; mereka berasal dari magetan, madiun, wonogiri, dan kota-kota lain di Jawa Timur. Seringkali, pekerjaan sebagai PSK dikaitkan dengan hal-hal yang tidak baik, seperti penyakit sosial yang mengganggu ketertiban dan keindahan kedungbanteng. Sebagian orang percaya bahwa tempat prostitusi hanya merusak masyarakat dan nama Kabupaten Ponorogo. (Mukramin & Nawir, 2018, hlm. 23). Persepsi negatif masyarakat terhadap PSK sebagai pekerjaan yang tidak bermoral dan dianggap sebagai sampah masyarakat berdampak pada perilaku atau respons masyarakat terhadap PSK. Masyarakat cenderung menjauhi, menganggap sebelah mata, atau bahkan memusuhi mereka yang melakukan pekerjaan ini, yang berdampak pada kepercayaan diri PSK itu sendiri. (Zuhri, 2022, hlm. 123)

Orang-orang yang tinggal di dekat permukiman sering mengalami gangguan seperti suara musik. yang bekerja keras hingga tengah malam. dan mempertimbangkan kekhawatiran yang relevan perkembangan moral remaja dan anak-anak di sekitar. (Prasetyo dkk., 2016)

3. Kesehatan Masyarakat

Kesehatan Mental dan Sosial: Pekerja seks yang kehilangan pekerjaan mungkin mengalami stres dan gangguan kesehatan mental akibat kehilangan sumber pendapatan dan identitas sosial mereka. Di tutupnya lokalisasi tersebut menjadikan semangat baru dalam bidang kesehatan, yang mana pada saat detik-detik penutupan Lokalisasi banyak disosialisasi bahaya dari virus mematikan HIV/AIDS tersebut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menjadikan efek takut bagi masyarakat terhadap virus tersebut. Sehingga mereka yang berpola pikir maju tentang kesehatan dapat mempengaruhi masyarakat sekitar untuk mempedulikan kesehatan pula. Di tutupnya lokalisasi tersebut menjadikan semangat baru dalam bidang kesehatan, yang mana pada saat detik- detik penutupan lokalisasi banyak disosialisasi bahaya dari virus mematikan HIV/AIDS tersebut oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo menjadikan efek takut bagi masyarakat terhadap virus tersebut. Sehingga mereka yang berpola pikir maju tentang kesehatan dapat mempengaruhi masyarakat sekitar untuk mempedulikan kesehatan pula.(Natsir, 2019b, hlm. 5)

Salah satu efek yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS adalah kecemasan, yang diikuti oleh ketidakmampuan untuk mengendalikan diri. penderitaan diri sendiri, depresi, dan agresi. Namun, munculnya gejala ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan karena tindakan yang dilakukan sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain..(Anggadewi, 2020, hlm. 6). Pemberitaan tentang HIV dapat berdampak negatif pada kelompok tertentu di masyarakat, yang merasa ketakutan berlebihan dan memberikan reaksi terhadap pengidap HIV dan keluarganya, yang cenderung emosional dan tidak manusiawi, menimbulkan rasa malu dan bersalah saat berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. (Puspita dkk., 2017, hlm. 159). Kontak biasa adalah cara HIV dapat menyebar. Tidak mungkin seseorang tertular atau menyebarkan virus hanya dengan memeluk orang lain, memakai handuk, atau memakai alat makan yang sama. Perilaku seks tidak aman, memakai jarum suntik bersama-sama, atau membuat tato di tubuh dengan alat yang tidak steril juga merupakan cara lain HIV dapat menyebar.(rsjmenurjatim, 2014)

Kesehatan Fisik : Prostitusi dianggap sebagai masalah sosial dan moral yang serius yang mempengaruhi masa depan masyarakat. Hal ini memiliki dampak negatif terhadap individu yang terlibat, seperti merusak kesehatan fisik dan emosional mereka, menyebarkan penyakit menular seksual, dan menghalangi kesempatan pendidikan dan karier. Hal ini juga memiliki dampak sosial, termasuk objektifikasi perempuan dan penurunan nilai-nilai moral. Permintaan akan layanan seksual ilegal juga dapat berkontribusi pada perdagangan manusia dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.(Laukon dkk., 2024, hlm. 157–158)

Di Indonesia, dari 1 April 1987 hingga 31 Desember 2012, total kasus HIV/AIDS sebanyak 98,390, dengan 42,887 kasus AIDS. Jumlah kasus HIV di provinsi Jawa Timur sebanyak 12,862, dengan 6,900 kasus AIDS, dan kasus AIDS di Kabupaten Jember sebanyak 822 kasus hingga Desember 2012. Menteri Kesehatan Ibu Nafsiah Mboi menyatakan pada Hari AIDS Sedunia 2012 di Jakarta bahwa 81,8% penularan HIV melalui transmisi seksual adalah jalur utama penularan di Indonesia dewasa ini dan ke depan, menurut data statistik dan hasil pemodelan matematik. (Rokhmah, t.t., hlm. 76)

Keamanan dan Ketenangan Sosial

Keamanan Masyarakat: Penutupan lokalisasi sering kali diikuti oleh pergeseran kegiatan ilegal ke area lain, yang dapat menimbulkan masalah keamanan baru di lingkungan sekitar. Masyarakat merasakan meningkatnya kenyamanan dan keamanan di wilayah Kedungbanteng pasca ditutupnya lokalisasi desa kedungbanteng. Sehingga mereka merasa lebih tenang dalam menjalankan aktivitas kehidupan. (Rahiem & Nourwahida, 2023, hlm. 150–151)

Kepala Desa juga menyatakan bahwa setelah lokasi ditutup, keadaan menjadi lebih damai dan tenang karena tidak ada lagi suara musik. Meskipun demikian, beberapa warga merasa dirugikan karena lokasi ditutup sehingga mereka tidak dapat berdagang. Langkah-langkah pemerintah untuk memperbaiki generasi muda harus diapresiasi. Penutupan lokasi adalah tonggak sejarah, dan ada pelajaran tersembunyi darinya bahwa memperjuangkan moral yang baik membutuhkan usaha besar. (Eko, 2023b, hlm. 9)

Keamanan dan ketertiban adalah hal yang dibutuhkan semua anggota masyarakat. Seperti yang kita ketahui, tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dan diawasi oleh aparaturnya keamanan negara, TNI, dan Polri. Sementara itu, program pengamanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik hanya jika dilakukan dengan baik. Rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Sistem keamanan lingkungan, atau siskamling, adalah salah satu program keamanan dan ketertiban tersebut. (kuswardani, 2022, hlm. 213)

Penutupan lokalisasi dapat mengurangi tingkat kriminalitas, terutama karena kekerasan terhadap pekerja seks meningkat. Pekerja seks menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, terutama yang dilakukan oleh klien atau pelanggan. Ketika lokasi ditutup, pekerja seks cenderung bekerja secara individu atau dalam kondisi yang lebih tersembunyi, sehingga menjadi semakin sulit untuk mengawasi dan melindungi mereka.

Selain itu, penutupan lokasi menyebabkan transaksi seksual menjadi lebih umum dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tempat yang tidak terpantau oleh penegak hukum. Karena hal ini,

deteksi dan pengendalian tindak kriminal menjadi lebih sulit. Akibatnya, risiko eksploitasi dan kekerasan terhadap pekerja seks meningkat, serta risiko kekerasan terhadap masyarakat di sekitar mereka dapat mengalami efek negatif dari tindakan kriminal yang sulit diidentifikasi dan diatasi. (Red_mania, 2019)

Dampak Penutupan Lokalisasi desa Kedungbanteng terhadap usaha lokal

Selama ini tempat lokalisasi Kedungbanteng sebagai penambah perekonomian masyarakat yang secara finansial sangat menggiurkan bagi para pembisnis tempat lokalisasi. Para pelaku prostitusi telah diubah dan berubah menjadi bagian bisnis prostitusi yang paling menguntungkan. Mengingat prostitusi ditempat lokalisasi merupakan komoditas yang tidak akan pernah habis terpakai oleh hingar-bingar para pelaku prostitusi yang berada ditempat lokalisasi tersebut. (12

Negara dengan Bisnis Prostitusi Terbesar di Dunia, Ada Nama Indonesia - Global Liputan6.com, t.t.) Dengan adanya penutupan Lokalisasi Kedungbanteng berdampak pada kondisi pekerjaan

para pegawai di setiap unit usaha lokal. Pegawai pada setiap unit usaha lokal bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan berkurangnya pembeli atau pelanggan sehingga para pegawai hanya bisa menunggu pelanggan yang baru di tempat mereka bekerja. Banyaknya pelanggan dahlunya dari penghuni wisma-wisma di Lokalisasi Desa Kedungbanteng. (Dedi Isnandar, 2015b, hlm. 96)

Penutupan lokalisasi di desa Kedungbanteng membawa konsekuensi tersendiri, yaitu maraknya praktik prostitusi liar. Sedangkan Pemkab Ponorogo belum dapat mengantisipasi dampak penutupan lokalisasi tersebut. Sementara para mucikari keukeuh bertahan di lokalisasi desa Kedungbanteng. Mereka sadar bahwa tanah yang mereka gunakan untuk penyewaan kamar bagi para PSK itu adalah tanah negara. Mereka beralasan penempatan lokalisasi disitu pada awalnya karena kebijakan dari Pemkab Ponorogo sendiri. Kontroversi penutupan lokalisasi berdampak bagi mereka yang mengais rezeki dari kawasan tersebut. Banyak yang menggantungkan hidup di sekitar lokalisasi. Sebelum penutupan lokalisasi, ekonomi mereka dapat terangkat, banyak kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar.

Penurunan jumlah pendapatan memiliki pengaruh langsung terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga dan tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan dapat diukur dari kesehatan, kebahagiaan, kualitas hidup, dan keadaan ekonomi. Keadaan yang berubah pasca penutupan lokalisasi membuat masyarakat harus mempertahankan kehidupannya dengan melakukan strategi adaptasi. Saat melakukan adaptasi, seseorang harus memanfaatkan kemampuan yang dimiliki, dengan

kemampuan tersebut, masyarakat mampu dengan mudah melakukan adaptasi dan mencari alternatif pekerjaan baru untuk mempertahankan keberlangsungan hidup.

Penutupan Lokalisasi Kedungbanteng memang sangat membawa dampak kepada masyarakat sekitarnya, khususnya masyarakat dukuh kalipucang yang menggantungkan hidupnya pada keberadaan lokalisasi. Perubahan yang terjadi bukan hanya masalah sosial akan tetapi sedikit banyak penutupan lokalisasi tersebut membawa dampak negatif pada sektor ekonomi masyarakat sekitar. Dampak perekonomian ini terlihat dengan tidak adanya PKL dan pedagang asongan yang ada di kawasan Lokalisasi Kedungbanteng seperti saat beroperasi.

“Penutupan lokalisasi biasanya berdampak pada ekonomi lokal melalui penyediaan pekerjaan tidak langsung, seperti penjual makanan atau jasa lainnya. Penutupan dapat mengurangi perputaran ekonomi lokal.” Kata Daroini

“Wati mengaku warga Wonogiri, Jawa Tengah, dan tinggal di Kedung Banteng sejak belasan tahun lalu,” katawati.

Wati menjual seluruh harta miliknya saat pindah dari kampung halamannya untuk membeli rumah di dalam kompleks prostitusi itu. Kemudian dia mampu membeli satu rumah lagi yang berada di luar kompleks lokalisasi Kedung Banteng, tetapi tepat di depannya.

Dia menceritakan bahwa Wati bisa menghidupi dirinya yang hanya hidup sebatang kara dengan uang untuk membeli rumah di daerah itu. Ia mengklaim dapat menghasilkan ratusan ribu rupiah setiap hari melalui penjualan kopi, makanan, dan barang lain.

Namun, setelah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa resmi menutup lokasi itu pada pertengahan tahun 2015, rumah di depan gerbang masuk menjadi harta terakhir. Saat penutupan, dia Padahal, rumah yang ia beli di kompleks tersebut seharga Rp60 juta, dia hanya menerima kompensasi senilai Rp4,3 juta.(Solopos.com, 2016)

Berkurangnya jenis mata pencaharian

Penutupan Lokalisasi kedungbanteng menjadikan masyarakat yang tinggal disekitar kehilangan mata pencahariannya dan mengharuskan mencari mata pencaharian yang baru, sebab dengan ditutupnya lokalisasi Kedungbanteng maka berkurangnya orang yang berkunjung di kawasan ini. Hal ini menjadikan masyarakat harus bekerja dan berusaha keras agar tetap dapat memenuhi kehidupannya sehari-hari. Banyak pekerja PSK yang dipulangkan ke kotanya masing-masing dan masih banyak pekerja yang tidak dipekerjakan seperti hal tersebut maka sekarang banyak yang bingung akan alih profesinya. (Natsir, 2019b, hlm. 4)

Pada saat pembacaan ikrar penutupan lokasi, masing-masing PSK sebenarnya mendapatkan uang sebesar Rp5.050.000, yang terdiri dari 3 juta rupiah untuk modal atau bekal, 1,8 juta rupiah untuk jatah hidup selama tiga bulan, dan 250.000 rupiah untuk mengganti biaya pulang ke rumah.

Pada saat itu, Khofifah mengatakan bahwa dana tersebut diberikan untuk mencegah para PSK kembali ke pekerjaan mereka yang lama. Dengan banyaknya pelatihan yang telah disediakan, harapan mereka adalah agar PSK tidak lagi bekerja di sini. Beliau menyatakan bahwa menekan prostitusi tidak hanya terkait dengan menutup lokasi prostitusi dengan memulangkan para PSK. Dia menyatakan bahwa prostitusi muncul karena permintaan, yaitu dari lelaki hidung belang.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Ponorogo Sumani mengatakan bahwa dia telah bekerja sama dengan Satpol PP Ponorogo, Tagana, Polres Ponorogo, dan TNI untuk berjaga selama dua bulan ke depan. Petugas akan berjaga di lokasi setiap saat. (Lokalisasi Kedung Banteng, Ponorogo Ditutup, t.t.)

Pengawasan dan Penegakan Hukum Kompensasi dan bantuan

Pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp3 juta kepada PSK yang berasal dari Ponorogo setelah penutupan Lokalisasi Kedung Banteng. Kompensasi ini dimaksudkan untuk membantu mereka dalam transisi mereka dari kehidupan prostitusi ke kehidupan yang lebih stabil. Meskipun demikian, kondisi para mantan PSK yang berasal dari luar wilayah Ponorogo lebih sulit. Pemerintah belum mencapai konsensus yang jelas tentang bantuan atau kompensasi bagi mereka hingga saat ini. Orang yang tidak berasal dari Ponorogo mungkin menghadapi masalah tambahan, seperti tidak memiliki akses ke sumber daya lokal, tidak memiliki jaringan dukungan, dan sulit menemukan pekerjaan atau tempat tinggal baru. Mantan PSK di luar daerah merasa lebih terbebani karena ketidakpastian ini. Untuk memastikan, mereka membutuhkan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang. (Agency, t.t.)

Pemerintah dan pengelola lokalisasi saat itu telah setuju untuk memindahkan lokasi ke kedung banteng. Pemerintah memberi kedung banteng lahan di pinggir desa dan fasilitas untuk membangun kembali rumah mereka yang tergusur. Namun, penduduk desa merasa tidak adil saat itu karena hanya ada tiga truk atau mobil yang disediakan pemerintah untuk mengangkut barang-barang, termasuk material. Paino (nama samaran) menceritakan kisahnya, berkata, "nggeh riyen niku namung tigang rit kendaraan mawon mbak saking pemerintah, padahal engkang badhe dipindahaken sekitar setunggalatusan kepala keluarga." Akhirnya, kesepakatan itu dilaksanakan. Paino membawa teman-temannya ke tempat baru di Kedung Banteng. (Mengintip Bilik-bilik Prostitusi Kedung Banteng di Ambang Penutupan Halaman 1 - Kompasiana.com, t.t.)

Peraturan Bupati

Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2015 menetapkan kebijakan resmi untuk menutup Lokasi Kedung Banteng. Peraturan ini mengatur banyak hal teknis dan prosedur yang perlu dilakukan selama

proses penutupan. Ini mencakup tindakan yang harus diambil oleh pemerintah daerah dan pihak terkait. Peraturan ini mencakup langkah-langkah yang harus diikuti, seperti pendataan penghuni lokasi, menyediakan bantuan dan kompensasi bagi mantan pekerja seks komersial, dan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memastikan penutupan berjalan lancar. Peraturan ini juga mengatur metode pengawasan pasca penutupan untuk menghentikan prostitusi di lokasi dan sekitarnya. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan penutupan dilakukan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan tujuan penutupan, yaitu menghilangkan prostitusi dari area Kedung Banteng. (Kusuma Dewi & Hilman, 2019)

Saat itu, Kementerian Sosial menargetkan "2019 Indonesia Bebas dari Lokalisasi". Pada tahun itu, terdapat 168 lokalisasi di Tanah Air, dengan 72 ditutup oleh Kementerian Sosial dan 81 ditutup oleh pemerintah daerah. Meskipun lima lokasi masih dalam tahap pembubaran. (Menyoal Dampak Penutupan Lokalisasi di Indonesia - Komnas HAM, t.t.)

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penutupan Lokalisasi Kedungbanteng terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat yang sebelumnya terlibat langsung dengan kawasan tersebut. Fokus utama dari penelitian ini guna memahami bagaimana penutupan ini mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar. Dampak Penutupan Lokalisasi Kedungbanteng memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Di satu sisi, penutupan ini membawa perubahan positif dalam pengurangan kegiatan ilegal dan peningkatan kualitas lingkungan. Namun, di sisi lain, penutupan ini juga menyebabkan kehilangan mata pencaharian bagi banyak individu yang sebelumnya bergantung pada kawasan tersebut, serta menciptakan tantangan baru dalam hal penghasilan dan integrasi sosial. Penulis memiliki solusi untuk mengatasi dampak negatif dari penutupan lokalisasi, dengan beberapa solusi yang dapat diimplementasikan, antara lain: Pertama, Program Pelatihan dan Pemberdayaan yang menyediakan pelatihan keterampilan dan dukungan untuk memfasilitasi transisi pekerja dari sektor yang terdampak ke sektor lain yang lebih produktif. Kedua, Penciptaan Kesempatan Kerja Baru dengan pengembangan inisiatif ekonomi baru di kawasan tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat yang terdampak. Ketiga, Program Dukungan Sosial dengan menyediakan bantuan sosial untuk keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan pendapatan. Masyarakat dapat bekerja sama dengan Pemerintah lokal dengan lembaga non-pemerintah serta sektor swasta untuk merancang dan melaksanakan program-program pemberdayaan yang komprehensif. Serta melakukan evaluasi berkala terhadap dampak penutupan dan efektivitas program yang dilaksanakan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan

solusi dan rekomendasi tersebut, diharapkan dampak penutupan Lokalisasi Kedungbanteng dapat dikelola dengan baik, dan masyarakat dapat beralih ke kehidupan yang lebih produktif dan stabil secara sosial-ekonomi.

REFERENSI

- 12 Negara dengan Bisnis Prostitusi Terbesar di Dunia, Ada Nama Indonesia — *Global Liputan6.com*. (t.t.). Diambil 14 Agustus 2024, dari [https://www.liputan6.com/global/read/4024634/12-negara-dengan-bisnis-prostitusi-terbesar-di-dunia-ada-nama-indonesia?.\[Accessed\]&page=2](https://www.liputan6.com/global/read/4024634/12-negara-dengan-bisnis-prostitusi-terbesar-di-dunia-ada-nama-indonesia?.[Accessed]&page=2)
- Agency, A. N. (t.t.). *Pemkab Gamang Tutup Lokalisasi Kedung Banteng*. ANTARA News Jawa Timur. Diambil
- 14 Agustus 2024, dari <https://jatim.antaranews.com/berita/145614/pemkab-gamang-tutup-lokalisasi-kedung-banteng>
- Anggadewi, B. E. T. (2020). *Dampak Psikologis Trauma Masa Kanak-kanak Pada Remaja*. 2(2).
- Ayu, N. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN LOKALISASI DOLOG TERHADAP DAMPAK SOSIAL MASYARAKAT (Studi Kasus Lokalisasi Dolog Kampung Anggur, Kecamatan Summersuko, Kabupaten Lumajang). *UNISMA Respository*, 1–28.
- Dedi Isnandar. (2015a). ANALISIS DAMPAK EKONOMI PENUTUPAN KAWASAN LOKALISASI KOTA SURABAYA (Studi Deskriptif Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Dolly bagi masyarakat di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 92–98. <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i2.36>
- Dedi Isnandar. (2015b). ANALISIS DAMPAK EKONOMI PENUTUPAN KAWASAN LOKALISASI KOTA SURABAYA (Studi Deskriptif Dampak Ekonomi Penutupan Lokalisasi Dolly bagi masyarakat di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya). *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 92–98. <https://doi.org/10.30649/aamama.v18i2.36>
- Eko, E. S. (2023a). DAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI PUGER KULON TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PUGER KABUPATEN JEMBER. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 532–543. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.8227>
- Eko, E. S. (2023b). DAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI PUGER KULON TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PUGER KABUPATEN JEMBER. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 10(1), 532–543. <https://doi.org/10.37304/wacana.v10i1.8227>
- Kusuma Dewi, D. S., & Hilman, Y. A. (2019). Relokasi Pekerja Seks Komersial setelah Penutupan Lokalisasi

- Kedung Banteng. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.24905/jip.4.1.2019.1-12>
- kuswardani, oktavia sekar hernarani. (2022). *Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Swakarsa Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar*. 18. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.6962>
- Laukon, D. R., Fadila, L., Edhistry, N. R., & Solihat, Z. H. (2024). Prostitusi Daring: Antara Kemajuan Teknologi dan Dampak Sosial. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(2).
- Lokalisasi Kedung Banteng, Ponorogo Ditutup*. (t.t.). SINDOnews Nasional. Diambil 18 Agustus 2024, dari <https://nasional.sindonews.com/berita/1010525/149/lokalisasi-kedung-banteng-ponorogo-ditutup>
- Mengintip Bilik-bilik Prostitusi Kedung Banteng di Ambang Penutupan Halaman 1 —Kompasiana.com*. (t.t.). Diambil 18 Agustus 2024, dari <https://www.kompasiana.com/filosofmuda08/551082c8a33311a32dba8ff5/mengintip-bilik-bilik-prostitusi-kedung-banteng-di-ambang-penutupan>
- Menyoal Dampak Penutupan Lokalisasi di Indonesia — Komnas HAM*. (t.t.). Diambil 18 Agustus 2024, dari https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/09/24/1170/menyoal-dampak-penutupan-lokalisasi-di-indonesia.html?utm_source=headlines
- Miftahul, J. (2016). REMAJA DAN TUGAS-TUGAS PERKEMBANGANNYA DALAM ISLAM. *Jurnal Psikoislamedia*, 1, 1–14.
- Mukramin, S., & Nawir, M. (2018). *KEHIDUPAN PROSTITUSI DAN AGAMA*.
- Natsir, M. (2019a). DAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA (STUDI KASUS: LOKALISASI DOLLY SURABAYA). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.192>
- Natsir, M. (2019b). DAMPAK PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR KELURAHAN PUTAT JAYA KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA (STUDI KASUS: LOKALISASI DOLLY SURABAYA). *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 2(1). <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i1.192>
- Persada, M. P. (t.t.). *Labelling Masyarakat Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial di Jombang*.
- Prasetyo, S., Supyana, R. H., & Sumarni. (2016). LATAR BELAKANG DAN KARAKTERISTIK PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DI KABUPATEN BATANG. *RISTEK : Jurnal Riset, Inovasi dan Teknologi Kabupaten Batang*, 1(1), 85–98. <https://doi.org/10.55686/ristek.v1i1.8>
- Pratama, I. (t.t.). *Dampak Penutupan Lokalisasi Bangunsari Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Bangunsari Krembangan, Surabaya*.

- Puspita, A., Hayati, F., & Fuadah, D. Z. (2017). *STIGMA MASYARAKAT TERHADAP ORANG DENGAN HIV AIDS (ODHA)*. 8(2).
- Rahiem, M. D. H., & Nourwahida, C. D. (2023). PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT KRAMAT TUNGGAK PASCA BERDIRINYA MASJID JAKARTA ISLAMIC CENTRE. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 4(1), 146. <https://doi.org/10.29103/jspm.v4i1.10378>
- Red_mania. (2019, Agustus 21). Penutupan Lokalisasi Bukan Solusi. *Magdalene.Co*. <https://magdalene.co/story/penutupan-lokalisasi-bukan-solusi/>
- Rokhmah, D. (t.t.). *DAMPAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENUTUPAN TEMPAT LAYANAN SOSIAL TRANSISI UNTUK PEKERJA SEKS KOMERSIAL DAN PENUTUPAN PROSTITUSI TERHADAP PROGRAM PENANGGULANGAN HIV AIDS DI KABUPATEN JEMBER*.
- rsjmenurjatim. (2014, April 28). *Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur*. <https://rsjmenur.id/post/2020-07-28/stigma-mitos-dan-fakta-hiv-aids>
- Solopos.com, R. (2016, April 18). *PROSTITUSI PONOROGO: Terpaksa Pindah, Begini Kisah Eks Penghuni Lokalisasi Kedung Banteng*. Solopos.com. <https://jatim.solopos.com/prostitusi-ponorogo-terpaksa-pindah-begini-kisah-eks-penghuni-lokalisasi-kedung-banteng-711398>
- Zuhri, M. S. (2022). *KONSEP DIRI PADA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI WARUNG REMANG-REMANG*. 3(2).